



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8268-8280

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Primordialisme Digital dan Polarisasi Politik dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia: Analisis Konflik Clifford Geertz terhadap Krisis Rasionalitas Demokrasi

Yolanda Tambunan, Lis Hayanti Warasi, Michelin Anasthasia Luther, Renata Pricilla, Ester Margareta Silaban, Bella Alzura

Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

yolandartdaystambunan@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis peran primordialisme dalam membentuk polarisasi politik pada Pemilu Presiden 2019 di Indonesia melalui perspektif teori konflik primordial Clifford Geertz serta melihat pengaruh media digital dalam memperkuat fragmentasi sosial politik. Polarisasi politik pada pemilu tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak hanya didasarkan pada rasionalitas programatik, tetapi juga dipengaruhi oleh ikatan primordial seperti agama, etnis, identitas kelompok, dan afiliasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan survei nasional, dan publikasi akademik yang membahas primordialisme, politik identitas, demokrasi digital, serta perilaku politik masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam memperkuat sentimen primordial melalui penyebaran narasi identitas, hoaks politik, simbol keagamaan, dan mobilisasi emosional berbasis kelompok. Dalam perspektif Clifford Geertz, ikatan primordial dapat menjadi alat integrasi sosial dalam kelompok, tetapi juga dapat berubah menjadi sumber konflik ketika dimobilisasi dalam kompetisi politik. Polarisasi yang terjadi berdampak pada melemahnya kualitas demokrasi deliberatif, menurunnya kohesi sosial, serta bergesernya orientasi pemilih dari pertimbangan rasional-programatik menuju loyalitas identitas. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan melihat transformasi primordialisme klasik menjadi primordialisme digital dalam konteks demokrasi kontemporer Indonesia. Dengan demikian, pemahaman terhadap politik identitas digital penting untuk merumuskan strategi pendidikan politik, literasi media, dan penguatan budaya demokrasi yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital tidak cukup dilakukan melalui regulasi teknis, tetapi juga memerlukan kesadaran warga negara untuk menolak ujaran kebencian, memeriksa informasi, dan membangun dialog lintas identitas selama proses politik yang sehat di masyarakat demokratis Indonesia modern.

Kata kunci: Primordialisme Digital, Polarisasi Politik, Politik Identitas, Demokrasi, Pemilu 2019

1. Latar Belakang

Demokrasi idealnya dibangun di atas prinsip rasionalitas politik, deliberasi publik, dan kompetisi gagasan yang sehat. Dalam sistem demokrasi modern, masyarakat diharapkan menentukan pilihan politik berdasarkan visi, program, dan kapasitas kandidat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di negara berkembang sering kali masih dipengaruhi oleh faktor-faktor nonrasional seperti agama, etnis, budaya, dan identitas sosial lainnya. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam dinamika politik Indonesia, khususnya pada Pemilu Presiden 2019 yang memperlihatkan tingkat polarisasi sosial-politik yang sangat tajam.

Pemilu Presiden 2019 menjadi salah satu momentum politik paling terpolarisasi dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Polarisasi yang muncul tidak hanya memperlihatkan perbedaan pilihan politik biasa, tetapi berkembang menjadi konflik sosial berbasis identitas. Ruang publik dipenuhi dikotomi “kami” dan “mereka” yang melibatkan sentimen agama, kelompok sosial, dan loyalitas emosional. Media sosial kemudian memperkuat polarisasi tersebut melalui penyebaran informasi yang bersifat provokatif, eksklusif, dan antagonistik.

Data dari [Kominfo](<https://www.kominfo.go.id?>) menunjukkan bahwa selama periode Pemilu 2019 terdapat ribuan konten hoaks politik dan identitas yang tersebar melalui media digital. Selain itu, survei [Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)](https://saifulmujani.com?utm_source) menunjukkan meningkatnya intoleransi

politik dan kecenderungan masyarakat memilih berdasarkan kedekatan identitas sosial dibandingkan program politik kandidat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi persoalan serius berupa menguatnya politik identitas dan menurunnya kualitas rasionalitas publik.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep primordialisme yang dikembangkan oleh Clifford Geertz. Geertz menjelaskan bahwa primordialisme merupakan keterikatan individu terhadap identitas sosial yang bersifat “given” atau melekat sejak lahir, seperti agama, etnis, bahasa, dan budaya. Ikatan tersebut membentuk loyalitas emosional yang kuat sehingga memengaruhi perilaku sosial dan politik individu. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, primordialisme dapat menjadi alat integrasi sosial sekaligus sumber konflik ketika dimobilisasi dalam kompetisi politik.

Penelitian mengenai primordialisme dalam politik Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih melihat primordialisme dalam bentuk konvensional dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan perkembangan demokrasi digital. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan melihat transformasi primordialisme klasik menjadi primordialisme digital melalui peran media sosial dan algoritma digital dalam memperkuat polarisasi politik di Indonesia.

Pembahasan mengenai primordialisme digital dalam Pemilu Presiden 2019 menjadi penting karena polarisasi yang terjadi tidak berhenti pada perbedaan dukungan terhadap pasangan calon, tetapi masuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik pada saat itu sering kali memengaruhi hubungan pertemanan, relasi keluarga, percakapan keagamaan, bahkan interaksi di ruang kerja dan komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik identitas telah bergerak melampaui arena elektoral dan berubah menjadi penanda sosial yang membelah masyarakat. Dalam situasi demikian, demokrasi tidak lagi hanya diuji melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi juga melalui kemampuan warga negara menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan menerima hasil politik tanpa permusuhan berkepanjangan.

Primordialisme dalam Pemilu Presiden 2019 dapat dilihat dari kuatnya penggunaan simbol agama, narasi moral, dan identitas kelompok dalam membentuk dukungan politik. Kandidat tidak hanya dinilai berdasarkan program ekonomi, pendidikan, hukum, atau pembangunan, tetapi juga melalui persepsi kedekatan dengan kelompok keagamaan tertentu, citra kesalehan, serta posisi terhadap isu-isu identitas. Dukungan politik kemudian berkembang menjadi bentuk loyalitas emosional yang sulit diperdebatkan secara rasional. Ketika pilihan politik dianggap sebagai bagian dari identitas diri, kritik terhadap kandidat sering dipahami sebagai serangan terhadap kelompok. Akibatnya, ruang diskusi menjadi sempit, karena argumen programatik kalah kuat dibandingkan sentimen kebersamaan kelompok.

Dalam perspektif Clifford Geertz, ikatan primordial memiliki kekuatan karena dianggap melekat, alami, dan sulit dinegosiasikan. Agama, etnis, bahasa, dan asal-usul sosial dipahami sebagai bagian dari identitas yang membentuk rasa memiliki. Dalam kehidupan sehari-hari, ikatan ini dapat berfungsi positif karena menciptakan solidaritas, rasa aman, dan kedekatan sosial. Namun, dalam kontestasi politik, ikatan primordial dapat dimobilisasi untuk membangun batas antara kelompok sendiri dan kelompok lain. Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan bagaimana identitas yang semula bersifat sosial berubah menjadi alat politik untuk memperkuat dukungan, menyerang lawan, dan mengonsolidasikan basis massa.

Perubahan paling menonjol dalam konteks demokrasi kontemporer adalah hadirnya media digital sebagai ruang baru mobilisasi primordialisme. Jika primordialisme klasik bekerja melalui keluarga, komunitas lokal, tokoh agama, organisasi sosial, dan jaringan tatap muka, maka primordialisme digital bekerja melalui media sosial, grup percakapan, kanal video, dan algoritma platform. Informasi politik tidak lagi disebarkan secara linear, tetapi bergerak cepat, berulang, dan emosional. Konten yang memuat kemarahan, ketakutan, ancaman identitas, atau kebanggaan kelompok cenderung lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penjelasan program yang panjang dan rasional. Hal ini membuat media digital menjadi arena subur bagi reproduksi sentimen primordial.

Algoritma media sosial turut memperkuat polarisasi karena pengguna cenderung menerima informasi yang sejalan dengan preferensi dan keyakinannya. Dalam ruang digital, masyarakat dapat terjebak dalam echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan informasi dan kelompok yang menguatkan pandangan sendiri. Akibatnya, pandangan politik lawan tidak lagi dipahami sebagai perbedaan pendapat, tetapi sebagai ancaman. Fenomena ini memperbesar jarak sosial antara kelompok pendukung, karena masing-masing pihak merasa paling

benar berdasarkan informasi yang beredar di lingkarannya. Ketika hoaks politik dan narasi kebencian masuk ke dalam ruang tertutup tersebut, proses koreksi menjadi semakin sulit.

Primordialisme digital juga berdampak pada kualitas demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menuntut adanya pertukaran gagasan yang rasional, terbuka, dan berbasis argumen. Namun, polarisasi berbasis identitas membuat debat publik lebih banyak diisi oleh label, tuduhan, dan prasangka. Dalam Pemilu 2019, sebagian percakapan politik di media sosial tidak lagi berfokus pada program kandidat, melainkan pada upaya membangun citra kelompok sendiri sebagai paling benar dan kelompok lawan sebagai berbahaya. Situasi ini melemahkan fungsi ruang publik sebagai tempat pembentukan opini rasional. Masyarakat tidak lagi berdialog untuk mencari kebenaran bersama, melainkan bertarung untuk memenangkan identitas masing-masing.

Dampak lain dari primordialisme digital adalah melemahnya sistem perwakilan politik. Dalam demokrasi perwakilan, pemilih seharusnya menilai kandidat berdasarkan kapasitas, rekam jejak, visi, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan publik. Akan tetapi, ketika pilihan politik terlalu kuat ditentukan oleh identitas primordial, akuntabilitas kandidat dapat melemah. Pemilih lebih mudah memaafkan kesalahan kandidat yang dianggap satu kelompok, sementara terlalu keras menilai kandidat dari kelompok lain. Hal ini berbahaya karena loyalitas identitas dapat menutup ruang evaluasi kritis terhadap kebijakan. Demokrasi akhirnya berisiko berubah menjadi kompetisi simbol, bukan kompetisi gagasan dan kinerja.

Selain itu, polarisasi primordial dapat menghambat konsolidasi demokrasi setelah pemilu selesai. Idealnya, setelah kontestasi berakhir, masyarakat kembali menerima pemerintahan terpilih sebagai bagian dari proses demokratis. Namun, apabila polarisasi dibangun melalui sentimen identitas yang tajam, luka sosial sulit pulih. Kekalahan politik dapat dimaknai sebagai kekalahan kelompok, bahkan sebagai ancaman terhadap eksistensi identitas tertentu. Kondisi ini dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, hasil pemilu, media arus utama, dan institusi demokrasi. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan semacam ini dapat melemahkan legitimasi politik dan membuka ruang bagi radikalisasi opini.

Oleh karena itu, analisis terhadap Pemilu Presiden 2019 penting bukan hanya untuk memahami peristiwa elektoral masa lalu, tetapi juga untuk membaca arah demokrasi Indonesia pada masa depan. Jika primordialisme digital tidak dikelola, pemilu berikutnya berpotensi mengulang pola polarisasi yang sama dengan intensitas yang lebih besar. Penguatan literasi politik dan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mampu membedakan informasi faktual, propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian. Pendidikan politik juga perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa identitas sosial tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak hak politik warga negara lain.

Artikel ini menempatkan teori konflik primordial Clifford Geertz sebagai pisau analisis untuk menjelaskan mengapa identitas yang bersifat emosional dapat menjadi sumber konflik dalam demokrasi elektoral. Namun, artikel ini juga memperluas pembacaan Geertz dengan memasukkan dimensi digital sebagai ruang baru reproduksi primordialisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat primordialisme sebagai warisan sosial tradisional, tetapi juga sebagai fenomena yang bertransformasi melalui teknologi komunikasi modern. Transformasi inilah yang disebut sebagai primordialisme digital, yaitu penggunaan identitas dasar manusia dalam ruang digital untuk membentuk loyalitas politik, memperkuat batas kelompok, dan memengaruhi perilaku memilih.

Dengan kerangka tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian primordialisme dengan menunjukkan bahwa ikatan primordial tidak melemah dalam demokrasi digital, tetapi justru menemukan medium baru untuk berkembang. Secara praktis, artikel ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya regulasi platform digital, literasi media, pendidikan politik lintas identitas, dan penguatan etika komunikasi publik. Demokrasi Indonesia membutuhkan pemilih yang tidak hanya bebas menggunakan hak suara, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghargai pluralitas, dan menempatkan kepentingan kebangsaan di atas loyalitas identitas sempit. Hal tersebut menjadi syarat penting agar pemilu tidak berubah menjadi arena permusuhan sosial yang merusak persatuan bangsa secara serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk primordialisme dalam polarisasi politik Pemilu Presiden 2019. Kedua, bagaimana teori konflik primordial Clifford Geertz menjelaskan fenomena tersebut. Ketiga, Bagaimana Pengaruh Primordialisme Digital Terhadap Kualitas Demokrasi dan Sistem Perwakilan Politik Di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap fenomena primordialisme dan polarisasi politik dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan survei politik, publikasi lembaga riset, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema primordialisme, politik identitas, demokrasi digital, dan perilaku politik masyarakat Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif teori konflik primordial Clifford Geertz untuk menjelaskan hubungan antara identitas sosial dan polarisasi politik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan demokrasi deliberatif untuk melihat bagaimana media digital memengaruhi kualitas ruang publik dan rasionalitas politik masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

Primordialisme dan Politik Identitas dalam Demokrasi Indonesia:

Primordialisme merupakan konsep yang menjelaskan keterikatan individu terhadap kelompok sosial tertentu yang dianggap bersifat alami dan melekat sejak lahir. Ikatan tersebut dapat berupa agama, etnis, bahasa, budaya, maupun asal daerah. Menurut Clifford Geertz, identitas primordial memiliki kekuatan emosional yang besar karena terbentuk melalui proses sosialisasi sosial dan budaya yang panjang. Dalam konteks politik, identitas primordial sering kali memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Individu cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap memiliki kedekatan identitas dengan dirinya. Loyalitas tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi lebih pada solidaritas emosional kelompok.

Fenomena ini semakin menguat dalam era digital. Media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi politik, tetapi juga menjadi arena pertarungan identitas. Menurut Manuel Castells, masyarakat digital membentuk “network society” di mana identitas sosial dapat dimobilisasi secara cepat melalui jaringan komunikasi digital. Dalam konteks Indonesia, media sosial mempercepat penyebaran sentimen primordial melalui propaganda politik, hoaks, dan narasi populisme identitas. Survei [Indikator Politik Indonesia] (https://indikator.co.id?utm_source) menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif mengakses media sosial cenderung lebih rentan terpapar polarisasi politik dan informasi berbasis identitas. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial turut memperkuat fragmentasi politik masyarakat Indonesia.

Primordialisme dan politik identitas dalam demokrasi Indonesia perlu dipahami sebagai fenomena yang tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari sejarah sosial masyarakat yang majemuk. Indonesia dibangun atas keberagaman agama, etnis, bahasa, budaya, dan daerah. Keberagaman tersebut pada dasarnya menjadi kekuatan integratif karena mampu memperkaya kehidupan kebangsaan. Namun, dalam situasi politik tertentu, identitas yang semula menjadi sumber solidaritas dapat berubah menjadi alat mobilisasi politik. Ikatan primordial membuat seseorang merasa dekat dengan kelompok yang memiliki kesamaan asal-usul, keyakinan, atau simbol budaya. Kedekatan ini sering kali membentuk loyalitas emosional yang lebih kuat dibandingkan pertimbangan rasional terhadap program dan kinerja politik.

Dalam konteks demokrasi elektoral, politik identitas muncul ketika identitas primordial digunakan untuk menarik dukungan pemilih. Pemilih tidak lagi semata-mata menilai kandidat berdasarkan visi, kapasitas, rekam jejak, atau kebijakan yang ditawarkan, tetapi juga berdasarkan persepsi kesamaan agama, etnis, kelompok sosial, atau kedekatan kultural. Fenomena ini bukan berarti identitas selalu negatif dalam politik. Identitas dapat menjadi sarana representasi kelompok yang selama ini merasa kurang terwakili. Akan tetapi, identitas menjadi problematis ketika digunakan secara eksklusif untuk membangun batas antara kelompok sendiri dan kelompok lain, sehingga lawan politik tidak dipandang sebagai pesaing demokratis, melainkan sebagai ancaman terhadap keberadaan kelompok.

Teori Clifford Geertz membantu menjelaskan mengapa identitas primordial memiliki daya pengaruh yang kuat dalam politik. Geertz melihat ikatan primordial sebagai sesuatu yang dianggap alami, melekat, dan bersumber dari pengalaman sosial yang panjang. Agama, bahasa, etnis, dan budaya tidak hanya menjadi tanda administratif, tetapi membentuk perasaan mendalam tentang siapa diri seseorang dan kepada siapa ia merasa memiliki kewajiban sosial. Karena itu, ketika identitas primordial disentuh dalam kampanye politik, respons pemilih dapat menjadi

sangat emosional. Dukungan terhadap kandidat dapat berubah menjadi ekspresi kesetiaan kelompok, sedangkan kritik terhadap kandidat dapat dipahami sebagai serangan terhadap identitas kolektif.

Demokrasi Indonesia memberikan ruang luas bagi ekspresi identitas. Partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal dapat berperan dalam membangun komunikasi politik dengan basis sosial tertentu. Namun, ruang tersebut membutuhkan etika demokrasi agar identitas tidak dimanfaatkan untuk memecah masyarakat. Politik identitas yang sehat seharusnya memperjuangkan kepentingan kelompok dalam kerangka kewarganegaraan yang inklusif. Artinya, kelompok boleh membawa aspirasi berdasarkan pengalaman sosialnya, tetapi tetap harus menghormati hak politik kelompok lain. Sebaliknya, politik identitas menjadi berbahaya apabila menumbuhkan prasangka, menyebarkan stigma, dan menolak legitimasi pihak yang berbeda identitas.

Dalam praktik politik Indonesia, primordialisme sering kali menguat ketika masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi, ketimpangan sosial, atau krisis kepercayaan terhadap institusi. Pada kondisi demikian, identitas menjadi pegangan yang memberikan rasa aman. Elite politik dapat memanfaatkan situasi ini dengan membangun narasi bahwa kelompok tertentu sedang terancam atau harus diselamatkan. Narasi seperti ini efektif karena bekerja pada wilayah emosi, bukan hanya nalar. Pemilih kemudian merasa bahwa pilihan politiknya bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjaga martabat, keyakinan, dan masa depan kelompoknya.

Era digital memperluas dampak primordialisme karena identitas dapat diproduksi, disebar, dan diperkuat dengan cepat melalui media sosial. Simbol agama, etnis, dan kelompok sosial dapat dikemas dalam bentuk gambar, video pendek, slogan, atau narasi viral yang mudah dibagikan. Proses ini membuat politik identitas semakin cepat menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak aktif dalam politik formal. Akibatnya, batas antara diskusi politik dan pertarungan identitas menjadi semakin kabur. Demokrasi akhirnya menghadapi tantangan untuk mempertahankan rasionalitas publik di tengah arus sentimen primordial yang terus diproduksi dalam ruang digital.

Oleh karena itu, kajian mengenai primordialisme dan politik identitas tidak cukup berhenti pada penjelasan bahwa masyarakat Indonesia plural. Hal yang lebih penting adalah memahami bagaimana keberagaman tersebut dikelola dalam sistem demokrasi. Jika institusi politik mampu menghadirkan keadilan, pendidikan politik, dan ruang dialog lintas kelompok, identitas dapat menjadi sumber partisipasi yang positif. Namun, jika institusi lemah dan elite lebih memilih eksploitasi emosi, identitas dapat menjadi bahan bakar konflik. Dalam kerangka ini, primordialisme perlu dibaca sebagai kekuatan sosial yang ambivalen. Ia dapat mempererat solidaritas, tetapi juga dapat memperdalam fragmentasi. Demokrasi Indonesia membutuhkan kemampuan untuk menempatkan identitas sebagai bagian dari kebangsaan, bukan sebagai dasar permusuhan politik. Dengan demikian, politik identitas hanya dapat diterima apabila diarahkan pada pengakuan, keadilan, dan kesetaraan, bukan pada eksklusivisme yang melemahkan persatuan warga. Kesadaran ini penting agar pemilu tidak hanya menghasilkan pemenang elektoral, tetapi juga menjaga keutuhan sosial setelah kontestasi politik berakhir. Tanpa pengelolaan demikian, demokrasi berisiko berubah menjadi arena kompetisi identitas yang keras, mudah dimanipulasi, dan sulit dipulihkan secara sosial dalam jangka panjang serius.

Polarisasi Politik dalam Pemilu Presiden 2019:

Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan pembelahan sosial yang sangat tajam dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi tidak hanya terjadi dalam arena politik formal, tetapi juga merambah kehidupan sosial sehari-hari. Perbedaan pilihan politik memengaruhi hubungan keluarga, komunitas, bahkan relasi pertemanan. Salah satu faktor utama yang memperkuat polarisasi tersebut adalah penggunaan isu agama dalam mobilisasi politik. Politik identitas digunakan sebagai instrumen untuk membangun loyalitas kelompok sekaligus menciptakan antagonisme terhadap kelompok lain. Dalam situasi ini, identitas agama menjadi simbol politik yang sangat kuat.

Media sosial memperparah kondisi tersebut. Selama Pemilu 2019, berbagai platform digital dipenuhi propaganda politik, ujaran kebencian, dan hoaks identitas. Data [Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia] (<https://www.kominfo.go.id?>) mencatat ribuan hoaks politik beredar selama periode pemilu, sebagian besar berkaitan dengan isu agama dan identitas kelompok. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami pergeseran dari demokrasi deliberatif menuju demokrasi emosional. Perdebatan politik tidak lagi berfokus pada adu gagasan dan program, tetapi lebih banyak dipenuhi mobilisasi sentimen kelompok.

Polarisasi politik dalam Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan bagaimana kompetisi elektoral dapat berubah menjadi pembelahan sosial yang luas. Perbedaan dukungan terhadap pasangan calon pada dasarnya merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tersebut tidak lagi dipahami sebagai variasi pilihan politik, melainkan sebagai batas identitas antara kelompok yang dianggap benar dan kelompok yang dianggap salah. Pada Pemilu 2019, pembelahan politik berlangsung kuat karena dukungan terhadap kandidat kerap dikaitkan dengan simbol agama, loyalitas kelompok, dan narasi moral tertentu. Akibatnya, kontestasi politik tidak hanya terjadi di ruang kampanye, tetapi juga masuk ke dalam percakapan sehari-hari masyarakat.

Polarisasi tersebut tampak dalam munculnya dikotomi sosial yang tajam. Masyarakat terbagi ke dalam kategori pendukung dan penentang, seolah-olah tidak ada ruang tengah untuk berdiskusi secara rasional. Setiap kelompok membangun narasi tentang dirinya sebagai pihak yang lebih benar, lebih bermoral, atau lebih mewakili kepentingan rakyat. Sebaliknya, kelompok lain digambarkan secara negatif, bahkan kadang dicurigai sebagai ancaman terhadap agama, bangsa, atau masa depan negara. Dalam situasi seperti ini, demokrasi kehilangan sebagian kualitas deliberatifnya karena perdebatan publik lebih banyak diisi oleh tuduhan, label, dan prasangka dibandingkan adu gagasan.

Salah satu faktor yang memperkuat polarisasi Pemilu 2019 adalah penggunaan isu agama dalam mobilisasi politik. Agama memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi sumber nilai moral yang dihormati. Namun, ketika agama digunakan sebagai alat pembeda politik secara eksklusif, ia dapat memicu ketegangan sosial. Pemilih tidak hanya diajak mempertimbangkan program kandidat, tetapi juga diarahkan untuk melihat pilihan politik sebagai bagian dari kewajiban moral atau pembelaan identitas. Hal ini membuat perbedaan politik terasa lebih sensitif karena menyentuh wilayah keyakinan yang dianggap sakral oleh banyak orang.

Media sosial memperluas dan mempercepat polarisasi tersebut. Berbagai platform digital menjadi tempat penyebaran propaganda, hoaks, ujaran kebencian, dan narasi identitas. Informasi yang bersifat provokatif lebih mudah viral karena memancing emosi, kemarahan, dan rasa takut. Pengguna media sosial sering membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, terutama jika informasi tersebut sesuai dengan pandangan politik kelompoknya. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi politik, tetapi juga ruang produksi konflik simbolik. Narasi yang berulang terus menerus membuat batas antara fakta, opini, dan propaganda semakin kabur.

Polarisasi Pemilu 2019 juga memperlihatkan rendahnya kualitas literasi politik dan literasi digital sebagian masyarakat. Banyak warga belum sepenuhnya mampu membedakan kritik politik yang sah dengan ujaran kebencian, atau membedakan informasi faktual dengan hoaks. Dalam kondisi ini, elite politik, buzzer, dan kelompok kepentingan dapat memanfaatkan ruang digital untuk membangun persepsi publik. Mereka menyusun pesan yang sederhana, emosional, dan mudah disebarkan. Pesan semacam ini sering kali lebih efektif dibandingkan penjelasan kebijakan yang kompleks. Akibatnya, pemilih lebih cepat merespons isu identitas daripada analisis program.

Dampak polarisasi tidak berhenti setelah pemungutan suara selesai. Ketegangan politik berlanjut dalam bentuk saling curiga, perdebatan berkepanjangan, dan penolakan terhadap legitimasi pihak lawan. Dalam beberapa kasus, perbedaan pilihan politik memengaruhi hubungan keluarga, pertemanan, dan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa polarisasi elektoral dapat berubah menjadi polarisasi sosial. Demokrasi menjadi rapuh apabila warga tidak lagi melihat lawan politik sebagai sesama warga negara yang memiliki hak berbeda, melainkan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Kondisi ini berbahaya bagi negara plural seperti Indonesia karena dapat melemahkan kohesi sosial.

Oleh karena itu, polarisasi politik dalam Pemilu 2019 perlu dibaca sebagai peringatan bagi demokrasi Indonesia. Pemilu tidak cukup dinilai dari keberhasilan prosedural seperti jumlah pemilih, kelancaran pemungutan suara, atau hasil resmi yang ditetapkan lembaga pemilu. Pemilu juga harus dinilai dari dampaknya terhadap hubungan sosial dan kualitas percakapan publik. Jika proses pemilu justru meninggalkan luka sosial yang dalam, maka demokrasi prosedural belum sepenuhnya berhasil membangun kedewasaan politik. Dalam konteks ini, partai politik, kandidat, media, tokoh masyarakat, dan penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah eksploitasi identitas secara berlebihan. Kampanye politik seharusnya diarahkan pada program, rekam jejak, dan solusi kebijakan, bukan pada penciptaan ketakutan kolektif. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan sikap kritis terhadap informasi politik, terutama yang beredar di media digital. Polarisasi dapat

dikurangi apabila warga mampu menerima perbedaan pilihan sebagai bagian normal dari demokrasi. Dengan demikian, pembelajaran utama dari Pemilu 2019 adalah perlunya memperkuat budaya demokrasi yang rasional, inklusif, dan tidak mudah terpecah oleh sentimen identitas. Upaya tersebut penting agar pemilu berikutnya tidak kembali menjadi arena permusuhan sosial, tetapi menjadi sarana pergantian kekuasaan yang damai dan bermartabat bagi seluruh warga negara dalam kehidupan politik Indonesia modern.

Analisis Konflik Primordial Clifford Geertz terhadap Polarisasi Politik:

Dalam perspektif teori konflik primordial, Clifford Geertz menjelaskan bahwa identitas primordial memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat integrasi sosial yang memperkuat solidaritas kelompok. Kedua, sebagai sumber konflik ketika digunakan dalam perebutan kekuasaan politik. Polarisasi politik dalam Pemilu Presiden 2019 merupakan manifestasi konflik primordial tersebut. Ketika identitas agama dan kelompok sosial digunakan dalam kompetisi politik, maka konflik politik berubah menjadi konflik simbolik yang berkaitan dengan harga diri dan eksistensi kelompok.

Geertz menilai bahwa konflik primordial cenderung sulit diselesaikan karena menyangkut nilai-nilai sakral yang telah melekat dalam identitas individu. Oleh karena itu, konflik politik berbasis identitas sering kali lebih emosional dibandingkan konflik politik programatik. Selain itu, fenomena Pemilu 2019 juga memperlihatkan adanya konstruksi politik identitas oleh elite politik. Identitas primordial tidak hanya muncul secara alami, tetapi diproduksi dan diperkuat melalui strategi komunikasi politik modern. Dalam konteks ini, media sosial menjadi alat utama untuk memperluas mobilisasi identitas dan memperdalam polarisasi sosial. Konsep ini relevan dengan pandangan Yascha Mounk mengenai krisis demokrasi liberal modern. Menurut Mounk, demokrasi kontemporer menghadapi ancaman serius ketika politik identitas dan populisme emosional lebih dominan dibandingkan rasionalitas deliberatif masyarakat.

Analisis konflik primordial Clifford Geertz terhadap polarisasi politik Pemilu Presiden 2019 memberikan kerangka penting untuk memahami mengapa konflik politik berbasis identitas cenderung lebih tajam dibandingkan konflik programatik. Geertz menjelaskan bahwa identitas primordial merupakan ikatan sosial yang dianggap melekat secara alami pada individu, seperti agama, etnis, bahasa, budaya, dan asal-usul daerah. Ikatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional karena terbentuk melalui pengalaman hidup, sosialisasi keluarga, pendidikan budaya, dan hubungan sosial yang panjang. Karena itu, ketika identitas primordial dibawa ke dalam kontestasi politik, respons masyarakat tidak selalu rasional, melainkan sering dipengaruhi oleh rasa memiliki dan loyalitas kelompok.

Dalam teori konflik primordial, identitas memiliki dua wajah. Di satu sisi, identitas berfungsi sebagai alat integrasi sosial. Ia memperkuat solidaritas, membangun rasa kebersamaan, dan memberikan rasa aman bagi anggota kelompok. Masyarakat yang memiliki kesamaan agama, budaya, atau asal-usul sering merasa memiliki ikatan moral yang kuat. Namun, di sisi lain, identitas dapat menjadi sumber konflik apabila digunakan untuk membedakan kelompok sendiri dengan kelompok lain secara antagonistik. Pemilu Presiden 2019 menunjukkan wajah kedua tersebut, ketika identitas agama dan kelompok sosial dimobilisasi untuk memperkuat dukungan politik sekaligus menciptakan jarak dengan kelompok lawan.

Polarisasi politik dalam Pemilu 2019 dapat dipahami sebagai konflik simbolik. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memenangkan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan simbol, harga diri, dan eksistensi kelompok. Ketika kandidat dipersepsikan sebagai representasi kelompok tertentu, kemenangan atau kekalahan kandidat dapat dimaknai sebagai kemenangan atau kekalahan identitas kolektif. Inilah yang membuat konflik politik berbasis primordial sulit diredakan. Perbedaan pilihan politik tidak lagi dipahami sebagai perbedaan strategi pembangunan, tetapi sebagai pertarungan antara kelompok yang dianggap mewakili nilai benar dan kelompok yang dianggap mengancam nilai tersebut.

Geertz menekankan bahwa konflik primordial sulit diselesaikan karena menyentuh nilai-nilai yang dianggap sakral. Jika konflik politik hanya berkaitan dengan program ekonomi atau kebijakan publik, kompromi masih dapat dilakukan melalui negosiasi. Namun, jika konflik dikaitkan dengan agama, martabat kelompok, atau identitas yang dianggap suci, kompromi menjadi lebih sulit. Dalam Pemilu 2019, penggunaan narasi agama dan moral dalam politik memperkuat dimensi sakral tersebut. Masyarakat tidak hanya diajak memilih kandidat, tetapi juga merasa sedang mempertahankan keyakinan dan kelompoknya. Akibatnya, kritik terhadap kandidat pilihan dapat terasa seperti serangan terhadap diri dan komunitas.

Selain itu, fenomena Pemilu 2019 menunjukkan bahwa identitas primordial tidak muncul secara spontan, tetapi juga diproduksi melalui strategi politik. Elite politik, tim kampanye, tokoh pendukung, dan jaringan digital dapat mengolah identitas menjadi pesan politik yang efektif. Narasi tentang ancaman, pengkhianatan, pembelaan agama, atau keselamatan bangsa digunakan untuk membangun mobilisasi emosional. Dalam kerangka Geertz, hal ini memperlihatkan bahwa ikatan primordial dapat diaktifkan kembali ketika ada aktor politik yang memiliki kepentingan. Identitas yang sebelumnya hidup sebagai bagian dari kebudayaan sehari-hari kemudian berubah menjadi alat persaingan kekuasaan.

Media sosial memperkuat proses aktivasi tersebut. Melalui platform digital, pesan berbasis identitas dapat disebar dengan cepat, diulang berkali-kali, dan dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami. Simbol, gambar, potongan video, dan slogan singkat mampu membangkitkan emosi lebih cepat daripada argumentasi panjang. Dengan cara ini, konflik primordial memasuki bentuk baru yang lebih luas jangkauannya. Masyarakat yang berbeda wilayah dapat mengalami kemarahan dan solidaritas yang sama karena mengonsumsi konten digital serupa. Proses ini memperlihatkan bahwa teori Geertz tetap relevan, tetapi perlu diperluas dengan memperhatikan teknologi komunikasi modern.

Relevansi teori Geertz juga terlihat dalam hubungan antara primordialisme dan krisis demokrasi liberal modern. Ketika politik identitas lebih dominan daripada rasionalitas publik, demokrasi mudah bergeser menjadi arena populisme emosional. Warga negara tidak lagi menilai gagasan secara terbuka, tetapi memilih berdasarkan kedekatan kelompok. Dalam kondisi ini, sistem demokrasi tetap berjalan secara prosedural, namun kualitas substansinya melemah. Pemilu tetap dilaksanakan, suara tetap dihitung, dan pemenang tetap ditetapkan, tetapi proses sosial yang menyertainya dapat merusak kepercayaan antarwarga. Oleh sebab itu, konflik primordial dalam Pemilu 2019 bukan hanya persoalan kampanye, tetapi persoalan kualitas integrasi nasional. Analisis Geertz membantu menunjukkan bahwa identitas tidak dapat dihapus dari politik, tetapi harus dikelola agar tidak menjadi sumber permusuhan. Demokrasi Indonesia perlu membangun ruang politik yang mampu mengakui identitas tanpa menjadikannya alat eksklusif. Dengan demikian, teori konflik primordial memberikan dasar untuk memahami akar emosional polarisasi sekaligus pentingnya membangun etika politik yang tidak mengeksploitasi identitas warga. Pengelolaan ini harus melibatkan elite, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil agar konflik politik tidak berubah menjadi konflik sosial berkepanjangan yang merusak stabilitas demokrasi Indonesia secara mendalam.

Primordialisme Digital dan Krisis Rasionalitas Demokrasi:

Kebaruan utama artikel ini terletak pada konsep primordialisme digital. Primordialisme tidak lagi hanya muncul melalui interaksi sosial konvensional, tetapi juga diproduksi dan diperkuat melalui teknologi digital dan algoritma media sosial. Algoritma media sosial menciptakan echo chamber, yaitu kondisi ketika individu hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan dan identitas kelompoknya. Akibatnya, masyarakat semakin sulit menerima pandangan yang berbeda dan cenderung mengalami radikalisasi identitas politik. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut menyebabkan demokrasi mengalami krisis rasionalitas. Masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi emosional dibandingkan evaluasi objektif terhadap kebijakan publik. Politik kemudian berubah menjadi arena pertarungan identitas yang antagonistik. Fenomena ini berbahaya bagi demokrasi karena mengurangi kualitas deliberasi publik dan memperlemah integrasi sosial nasional. Jika terus berlangsung, primordialisme digital berpotensi menciptakan fragmentasi sosial permanen dalam masyarakat Indonesia.

Primordialisme digital merupakan bentuk baru dari politik identitas yang berkembang melalui teknologi komunikasi modern. Jika primordialisme klasik terbentuk melalui hubungan sosial langsung, lingkungan keluarga, komunitas keagamaan, etnis, budaya, atau asal daerah, maka primordialisme digital diproduksi dan diperkuat melalui media sosial, algoritma, serta jaringan komunikasi daring. Perubahan ini penting karena media digital membuat identitas dapat disebarluaskan secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih emosional. Dalam konteks Pemilu Presiden 2019, media sosial menjadi ruang utama tempat narasi identitas diproduksi, dikonsumsi, diperdebatkan, dan dipertentangkan oleh masyarakat. Akibatnya, polarisasi politik tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual.

Krisis rasionalitas demokrasi muncul ketika warga negara lebih mudah dipengaruhi oleh narasi emosional dibandingkan argumentasi berbasis data dan program. Demokrasi membutuhkan kemampuan warga untuk menilai kandidat, kebijakan, dan informasi politik secara kritis. Namun, dalam ruang digital, pesan politik yang paling cepat menyebar sering kali bukan pesan yang paling benar, melainkan pesan yang paling kuat memancing emosi. Konten yang mengandung ketakutan, kemarahan, kebanggaan kelompok, atau ancaman identitas lebih mudah

menarik perhatian pengguna. Hal ini menyebabkan diskusi politik bergeser dari adu gagasan menuju pertarungan emosi dan simbol identitas.

Algoritma media sosial memiliki peran besar dalam memperkuat primordialisme digital. Platform digital umumnya bekerja dengan menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan perilaku pengguna sebelumnya. Jika seseorang sering membaca atau membagikan konten politik tertentu, sistem akan terus menyajikan konten serupa. Kondisi ini menciptakan echo chamber, yaitu ruang informasi tertutup yang membuat seseorang merasa pandangannya selalu benar karena terus diperkuat oleh informasi sejenis. Dalam echo chamber, pandangan berbeda jarang muncul, atau muncul dalam bentuk yang sudah disaring sebagai ancaman. Akibatnya, kemampuan untuk memahami posisi politik kelompok lain semakin melemah.

Primordialisme digital juga berkaitan dengan pembentukan identitas kelompok secara daring. Di media sosial, pengguna dapat menemukan komunitas politik yang memiliki pandangan sama. Mereka saling memperkuat keyakinan, membagikan narasi kelompok, dan membangun solidaritas simbolik. Solidaritas ini dapat menjadi positif apabila mendorong partisipasi politik yang sehat. Namun, ia menjadi berbahaya jika dibangun melalui kebencian terhadap kelompok lain. Dalam Pemilu 2019, banyak narasi politik yang mengandalkan oposisi antara kelompok sendiri dan kelompok lawan. Identitas agama, pilihan politik, dan loyalitas kandidat dipadukan menjadi satu paket emosional yang sulit dipisahkan.

Krisis rasionalitas demokrasi juga terlihat dari kecenderungan masyarakat mempercayai informasi yang sesuai dengan identitasnya, meskipun informasi tersebut belum terverifikasi. Hoaks politik dapat menyebar luas karena diterima bukan berdasarkan kebenaran faktual, tetapi karena dianggap sejalan dengan perasaan kelompok. Ketika suatu informasi memperkuat pandangan bahwa kelompok sendiri benar dan kelompok lain salah, informasi tersebut lebih mudah dipercaya. Kondisi ini melemahkan budaya verifikasi dan memperbesar peluang manipulasi politik. Demokrasi menjadi rentan karena keputusan politik warga dipengaruhi oleh informasi yang tidak akurat, tetapi sangat kuat secara emosional.

Dalam situasi seperti ini, primordialisme digital mengancam kualitas ruang publik. Ruang digital seharusnya dapat memperluas partisipasi politik dan mempertemukan berbagai gagasan. Namun, ketika ruang tersebut dikuasai oleh polarisasi identitas, fungsi deliberatifnya melemah. Masyarakat tidak lagi berdialog untuk mencari pemahaman bersama, tetapi berkompetisi untuk memenangkan narasi kelompok. Perdebatan menjadi keras, penuh label, dan sering kali tidak menghasilkan pertukaran gagasan yang produktif. Akibatnya, demokrasi kehilangan salah satu fondasinya, yaitu kemampuan warga untuk berkomunikasi secara rasional meskipun berbeda pilihan politik.

Untuk mengatasi krisis ini, literasi digital dan literasi politik menjadi kebutuhan mendesak. Warga perlu memiliki kemampuan mengenali hoaks, memeriksa sumber informasi, memahami cara kerja algoritma, dan menyadari bahwa tidak semua informasi viral memiliki dasar kebenaran. Selain itu, platform digital perlu memiliki tanggung jawab dalam membatasi penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu tanpa menghilangkan kebebasan berekspresi. Negara juga perlu membangun regulasi yang adil, transparan, dan tidak digunakan untuk membungkam kritik. Dengan demikian, pengelolaan primordialisme digital harus dilakukan secara seimbang antara pendidikan masyarakat, tanggung jawab platform, dan tata kelola demokratis.

Primordialisme digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak otomatis membuat demokrasi menjadi lebih rasional. Teknologi dapat memperluas akses informasi, tetapi juga dapat mempercepat penyebaran sentimen identitas. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia perlu memperkuat budaya politik yang menghargai perbedaan dan menolak manipulasi identitas. Identitas sosial tetap penting sebagai bagian dari kehidupan warga, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghancurkan nalar publik. Jika tidak dikelola, primordialisme digital dapat menciptakan fragmentasi sosial permanen dan melemahkan integrasi nasional. Dengan demikian, tantangan utama demokrasi digital bukan hanya akses teknologi, tetapi kemampuan warga menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam politik demokratis.

Dampak terhadap Demokrasi dan Sistem Perwakilan Politik:

Polarisasi politik berbasis primordial memiliki dampak serius terhadap demokrasi Indonesia. Pertama, kualitas diskursus publik menurun karena perdebatan politik lebih banyak dipenuhi konflik identitas dibandingkan pembahasan program kebijakan. Kedua, polarisasi memperlemah kohesi sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik yang seharusnya menjadi bagian normal dalam demokrasi berubah menjadi konflik sosial yang

berkepanjangan. Ketiga, sistem perwakilan politik menjadi kurang berkualitas. Kandidat politik tidak selalu dipilih berdasarkan kapasitas dan kompetensi, tetapi lebih pada kedekatan identitas dengan pemilih. Akibatnya, demokrasi kehilangan orientasi meritokratis dan lebih didominasi loyalitas kelompok. Keempat, meningkatnya politik identitas memperlihatkan lemahnya pendidikan politik masyarakat dan rendahnya literasi digital. Kondisi ini memudahkan elite politik menggunakan isu primordial sebagai alat mobilisasi massa.

Dampak primordialisme digital terhadap demokrasi dan sistem perwakilan politik di Indonesia sangat penting untuk dibahas karena menyangkut kualitas hubungan antara warga negara, partai politik, kandidat, dan lembaga negara. Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi juga dari kualitas partisipasi, rasionalitas pemilih, keterbukaan diskusi publik, dan kemampuan sistem politik menghasilkan wakil yang kompeten. Ketika polarisasi berbasis identitas terlalu kuat, proses demokrasi berisiko kehilangan orientasi substantifnya. Pemilih dapat lebih fokus pada kedekatan identitas dengan kandidat daripada kemampuan kandidat menyelesaikan persoalan publik.

Dampak pertama terlihat pada menurunnya kualitas diskursus publik. Dalam demokrasi yang sehat, ruang publik seharusnya menjadi tempat masyarakat memperdebatkan program, visi, kebijakan, dan rekam jejak kandidat. Namun, dalam suasana polarisasi primordial, diskusi politik sering bergeser menjadi pertentangan identitas. Pertanyaan tentang bagaimana kandidat mengatasi kemiskinan, memperbaiki pendidikan, menegakkan hukum, atau mengelola ekonomi sering kalah oleh isu tentang agama, kelompok sosial, dan loyalitas simbolik. Akibatnya, masyarakat lebih sibuk mempertahankan kelompoknya daripada menilai kelayakan program secara objektif. Hal ini menurunkan kualitas deliberasi demokratis.

Dampak kedua adalah melemahnya kohesi sosial. Indonesia merupakan negara plural yang membutuhkan kemampuan mengelola perbedaan. Perbedaan pilihan politik seharusnya menjadi hal biasa dalam demokrasi, tetapi polarisasi identitas membuat perbedaan tersebut terasa seperti permusuhan. Dalam Pemilu 2019, pembelahan politik tidak hanya terjadi di ruang formal, tetapi juga masuk ke lingkungan keluarga, pertemanan, komunitas, dan media sosial. Ketika hubungan sosial terganggu karena pilihan politik, demokrasi kehilangan fungsi integratifnya. Masyarakat menjadi lebih mudah curiga, sulit berdialog, dan cenderung menilai orang lain berdasarkan posisi politiknya.

Dampak ketiga berkaitan dengan kualitas sistem perwakilan politik. Dalam sistem perwakilan, pemilih memberikan mandat kepada kandidat atau partai untuk memperjuangkan kepentingan publik. Idealnya, mandat tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap kapasitas, integritas, kompetensi, dan program kerja. Namun, ketika primordialisme mendominasi, pemilih dapat memilih kandidat karena kesamaan identitas, bukan karena kualitas kepemimpinan. Akibatnya, prinsip meritokrasi melemah. Kandidat yang memiliki kemampuan baik tetapi dianggap berbeda identitas bisa ditolak, sedangkan kandidat yang kurang kompeten dapat memperoleh dukungan kuat karena dianggap mewakili kelompok tertentu. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas representasi politik.

Dampak keempat adalah melemahnya akuntabilitas politik. Pemilih yang terlalu terikat pada loyalitas identitas cenderung sulit bersikap kritis terhadap kandidat pilihannya. Kesalahan, kelemahan program, atau kegagalan kebijakan dapat dimaklumi karena kandidat dianggap bagian dari kelompok sendiri. Sebaliknya, tindakan baik dari kandidat lawan sering diabaikan atau dicurigai. Hal ini membuat evaluasi politik menjadi tidak seimbang. Dalam jangka panjang, akuntabilitas demokratis dapat melemah karena kandidat tidak lagi dituntut menunjukkan kinerja yang baik, melainkan cukup menjaga simbol dan dukungan identitas kelompok. Demokrasi kemudian berubah menjadi kompetisi loyalitas, bukan kompetisi tanggung jawab publik.

Dampak kelima adalah meningkatnya kerentanan terhadap manipulasi elite politik. Ketika masyarakat mudah digerakkan oleh sentimen primordial, elite memiliki peluang besar menggunakan isu identitas sebagai alat mobilisasi massa. Strategi ini sering lebih murah dan lebih cepat dibandingkan menawarkan program kebijakan yang rumit. Dengan membangun narasi ancaman terhadap agama, budaya, atau kelompok tertentu, elite dapat menciptakan dukungan emosional yang kuat. Namun, strategi tersebut merugikan demokrasi karena memperdalam perpecahan dan mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan substantif seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum.

Dampak berikutnya adalah melemahnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Polarisasi berbasis identitas sering membuat kelompok yang kalah merasa tidak hanya kalah secara elektoral, tetapi juga terancam secara sosial dan simbolik. Ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu, lembaga penyelenggara, media, dan pemerintah dapat

meningkat apabila narasi identitas terus dipelihara. Dalam kondisi demikian, demokrasi prosedural menjadi rapuh karena legitimasi politik sulit diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Padahal, stabilitas demokrasi membutuhkan kesediaan warga untuk menerima hasil kontestasi secara damai, sambil tetap menjaga hak kritik terhadap pemerintah.

Untuk mencegah dampak tersebut, diperlukan penguatan pendidikan politik dan literasi digital. Masyarakat perlu dibiasakan menilai kandidat berdasarkan program, kompetensi, dan integritas, bukan hanya kesamaan identitas. Partai politik juga harus berperan sebagai lembaga pendidikan demokrasi, bukan sekadar mesin elektoral yang mengeksploitasi emosi pemilih. Media dan platform digital perlu mendorong informasi yang akurat serta mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, elite politik harus membangun etika kompetisi yang tidak menjadikan identitas sebagai senjata utama. Dengan cara tersebut, demokrasi Indonesia dapat mengurangi risiko polarisasi dan memperbaiki kualitas sistem perwakilan politik. Pada akhirnya, sistem perwakilan yang sehat hanya dapat tumbuh apabila pemilih memiliki kebebasan berpikir, akses informasi benar, dan keberanian menilai kekuasaan secara kritis tanpa terjebak dalam loyalitas identitas yang sempit dan eksklusif berkepanjangan.

Diskusi

Diskusi mengenai primordialisme dan polarisasi politik dalam Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam membangun rasionalitas politik warga negara. Secara normatif, pemilu seharusnya menjadi ruang kompetisi gagasan, program, dan kapasitas kepemimpinan. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses elektoral sering kali dipengaruhi oleh ikatan identitas yang kuat, terutama agama, etnis, kelompok sosial, dan afiliasi komunitas. Pada Pemilu Presiden 2019, perbedaan pilihan politik tidak hanya muncul sebagai variasi preferensi demokratis, melainkan berkembang menjadi pembelahan sosial yang tajam. Masyarakat terbagi dalam kategori “kami” dan “mereka”, sehingga dukungan politik berubah menjadi bentuk loyalitas emosional terhadap kelompok.

Primordialisme berperan penting dalam menjelaskan fenomena tersebut. Dalam pandangan Clifford Geertz, identitas primordial merupakan keterikatan yang dianggap melekat, alami, dan sulit dilepaskan dari diri seseorang. Ikatan seperti agama, etnis, bahasa, budaya, dan asal daerah membentuk rasa kebersamaan yang kuat dalam kelompok. Pada satu sisi, ikatan primordial dapat menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat identitas kolektif. Namun, pada sisi lain, ketika identitas tersebut dimobilisasi dalam kompetisi politik, ia dapat berubah menjadi sumber konflik. Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa identitas primordial digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat dukungan, membangun batas sosial, dan menciptakan antagonisme terhadap kelompok lawan.

Bentuk primordialisme yang paling menonjol dalam Pemilu 2019 adalah penggunaan isu agama sebagai alat mobilisasi politik. Identitas agama tidak hanya hadir sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga dikonstruksi menjadi simbol politik. Kandidat dan kelompok pendukung kerap dinilai berdasarkan persepsi kedekatan dengan kelompok keagamaan tertentu, bukan semata berdasarkan program dan rekam jejak. Akibatnya, pilihan politik menjadi sarat muatan moral dan emosional. Ketika seorang pemilih mendukung kandidat tertentu, dukungan tersebut sering dipahami sebagai bagian dari pembelaan terhadap identitas kelompok. Sebaliknya, pihak yang berbeda pilihan politik dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai kelompok sendiri.

Media sosial memperkuat dinamika tersebut. Ruang politik tidak lagi hanya berlangsung melalui kampanye terbuka, debat publik, media massa, atau organisasi partai, tetapi juga melalui platform digital melalui grup percakapan. Media sosial memungkinkan informasi politik tersebar dengan cepat, luas, dan berulang, tetapi kecepatan tersebut tidak selalu diikuti oleh akurasi. Selama Pemilu 2019, ruang digital dipenuhi oleh propaganda politik, hoaks, ujaran kebencian, dan narasi identitas. Konten yang bersifat emosional cenderung lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penjelasan programatik yang kompleks.

Kondisi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai primordialisme digital. Primordialisme tidak lagi hanya diproduksi melalui keluarga, tokoh agama, komunitas lokal, atau organisasi kemasyarakatan, tetapi juga melalui algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan menampilkan konten yang dianggap sesuai dengan minat, kebiasaan, dan preferensi pengguna. Akibatnya, masyarakat sering terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang memperkuat pandangan politiknya sendiri. Dalam situasi ini, informasi dari kelompok lain cenderung ditolak, dicurigai, atau dianggap sebagai ancaman, sehingga jarak sosial antarpengikut semakin melebar.

Primordialisme digital juga menyebabkan krisis rasionalitas demokrasi. Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu mempertimbangkan program, mengevaluasi kebijakan, dan menilai kandidat secara kritis. Akan tetapi, ketika identitas menjadi dasar utama dalam pilihan politik, rasionalitas publik dapat melemah. Pemilih lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan identitas kelompoknya meskipun informasi tersebut belum tentu benar. Sebaliknya, informasi yang mengkritik kelompok sendiri sering dianggap sebagai serangan. Dalam keadaan seperti ini, diskursus publik tidak lagi menjadi pertarungan narasi antara kelompok yang saling mencurigai.

Dampak dari kondisi tersebut serius bagi kualitas demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menuntut adanya ruang dialog yang terbuka, setara, dan berbasis argumen. Namun, polarisasi primordial membuat ruang publik dipenuhi label negatif, prasangka, dan serangan emosional. Perdebatan politik tidak lagi berpusat pada isu kesejahteraan, pendidikan, hukum, ekonomi, atau pelayanan publik, tetapi pada siapa yang dianggap mewakili identitas tertentu. Pemilu kehilangan sebagian fungsi edukatifnya. Masyarakat tidak diajak menilai program secara rasional, melainkan didorong mempertahankan kesetiaan kelompok. Hal ini menurunkan kualitas partisipasi politik warga negara.

Selain berdampak pada diskursus publik, polarisasi primordial juga melemahkan kohesi sosial. Perbedaan pilihan politik yang seharusnya wajar dalam demokrasi berubah menjadi konflik sosial berkepanjangan. Hubungan keluarga, pertemanan, dan komunitas dapat terganggu karena perbedaan dukungan politik. Masyarakat menjadi lebih mudah curiga terhadap kelompok lain dan lebih sulit membangun kerja sama lintas identitas. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, kondisi ini berbahaya karena persatuan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengelola perbedaan. Jika polarisasi identitas terus dibiarkan, demokrasi dapat kehilangan fungsi integratifnya sebagai sistem yang menyatukan warga dalam kerangka kewarganegaraan bersama.

Sistem perwakilan politik juga terdampak oleh menguatnya primordialisme digital. Idealnya, kandidat dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, program, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan publik. Namun, ketika pemilih lebih menekankan kedekatan identitas, standar evaluasi terhadap kandidat menjadi tidak seimbang. Kandidat yang dianggap satu kelompok cenderung lebih mudah diberi toleransi meskipun memiliki kekurangan, sedangkan kandidat dari kelompok lain lebih mudah ditolak meskipun memiliki program yang baik. Hal ini dapat melemahkan prinsip meritokrasi dalam demokrasi dan membuat kompetisi politik lebih banyak ditentukan oleh simbol identitas daripada kualitas kepemimpinan.

Dalam konteks teori konflik primordial Geertz, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik politik berbasis identitas lebih sulit diredakan dibandingkan konflik berbasis kepentingan rasional. Jika konflik bersumber dari perbedaan program, maka kompromi masih mungkin dilakukan melalui negosiasi kebijakan. Akan tetapi, jika konflik dikaitkan dengan identitas sakral, harga diri kelompok, dan rasa keterancaman kolektif, maka kompromi menjadi lebih sulit. Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa identitas primordial yang dimobilisasi secara digital mampu memperpanjang ketegangan politik bahkan setelah pemungutan suara selesai. Hal ini menjadi tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.

Penguatan demokrasi Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu prosedural. Demokrasi juga membutuhkan literasi politik, literasi digital, dan etika kewargaan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memeriksa informasi, mengenali hoaks, menolak ujaran kebencian, serta membedakan kritik politik dari serangan identitas. Partai politik dan elite juga harus bertanggung jawab untuk tidak mengeksploitasi sentimen primordial demi keuntungan elektoral jangka pendek. Penguatan regulasi platform digital, pendidikan politik lintas identitas, serta ruang dialog antarwarga perlu dikembangkan agar demokrasi tidak terjebak dalam konflik identitas yang berulang. Dengan demikian, primordialisme digital harus dipahami sebagai tantangan baru yang memerlukan respons serius. Pemilu 2019 memberikan pelajaran bahwa teknologi digital dapat memperluas partisipasi politik, tetapi juga dapat memperdalam polarisasi bila tidak disertai kedewasaan demokratis. Identitas sosial seharusnya menjadi bagian dari kekayaan bangsa, bukan alat untuk menciptakan permusuhan politik. Demokrasi Indonesia akan lebih sehat apabila pilihan politik dibangun di atas nalar kritis, penghargaan terhadap pluralitas, dan komitmen pada kepentingan bersama.

4. Kesimpulan

Primordialisme memiliki peran signifikan dalam membentuk polarisasi politik pada Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Penggunaan identitas agama dan kelompok sosial sebagai instrumen mobilisasi politik menunjukkan bahwa loyalitas primordial masih sangat kuat dalam perilaku politik masyarakat Indonesia. Melalui perspektif

teori konflik Clifford Geertz, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi ikatan dan kesetiaan primordial yang mendorong masyarakat memilih berdasarkan loyalitas identitas dibandingkan rasionalitas politik. Artikel ini menemukan bahwa perkembangan media digital telah mentransformasikan primordialisme klasik menjadi primordialisme digital. Media sosial dan algoritma digital memperkuat polarisasi politik melalui penyebaran narasi identitas, hoaks politik, dan mobilisasi emosional berbasis kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, peningkatan literasi digital, pengawasan terhadap penyebaran disinformasi politik, serta komitmen elite politik untuk tidak mengeksploitasi isu identitas dalam demokrasi Indonesia.

Referensi

1. Almond, Gabriel A., dan James S. Coleman. *The Politics of Developing Areas*. Princeton: Princeton University Press, 1960.
2. Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
3. Geertz, Clifford. *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*. New York: Free Press, 1963.
4. Mounk, Yascha. *The People vs Democracy*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
5. Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajakan Teoretis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
6. Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
7. Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press, 2016.
8. Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies*, Vol. 49, No. 3, 2017.
9. Aspinall, Edward. "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 56, No. 1, 2020.
10. Fajri, P. C. (2024). *The Political Domination of Identity in Indonesian Political Controversy and Mitigation of Election 2024*. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 16(2), 66-73.
11. Kartiko, A. (2025). *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*. USK Press.
12. Fajri, P. C. (2023). Dominasi politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia serta mitigasinya jelang Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 5(2), 1-14.
13. Tri Siswanti, S. (2026). *THE POWER SHOW: BRAND, CITRA, DAN DRAMATURGI KEKUASAAN*. PENERBIT KBM INDONESIA.
14. Badrun, U. (2021). *Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivis*. Bumi Aksara.
15. Rozaki, A. *Diaspora Madura: Resiliensi, Strategi, dan Transformasi Pasca konflik Etnik*. IRCiSoD.